

Judul : Mitigasi dan respons bisa lebih cepat, Kementerian Penanggulangan Bencana, perlukah dibentuk?
Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Mitigasi Dan Respons Bisa Lebih Cepat

Kementerian Penanggulangan Bencana, Perlukah Dibentuk?

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengusulkan agar Pemerintah membentuk kementerian khusus yang fokus menangani penanggulangan bencana. Pasalnya, skala bencana belakangan ini sudah terlalu masif untuk ditangani dengan struktur yang ada.

UTUT bilang, kementerian khusus ini bisa fokus pada mitigasi dan respons bencana. "Ke depan, mungkin Ibu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) bisa ngomong sama Pak Presiden, perlunya Menteri Bencana atau Penanggulangan Bencana," usul Utut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Demi merealisasikan usul tersebut, Utut mengaku sudah memiliki gambaran secara spesifik mengenai struktur kementerian bencana. Idealnya memiliki direktorat jenderal (dirjen) yang dibagi sesuai jenis ancaman bencana yang ada untuk memastikan penanganan yang lebih fokus dan ahli.

"Ada Direktorat Denderal (Dirjen) Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan," sebut politikus PDIP itu.

Namun, masalah utama dari usulan ini adalah masalah finansial negara. Sebab, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini tidak dirancang untuk mena-

han guncangan biaya bencana yang datang secara tiba-tiba dan dalam jumlah sangat besar.

"Karena kalau angkanya sekarang, APBN jelas nggak kuat. APBN itu konsepnya belanja dan bukan menabung," ucap legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Lebih lanjut, Utut menyampaikan duka mendalam atas banyaknya korban jiwa akibat banjir dan longsor yang terjadi di Sumbar, Sumut dan Aceh. Apalagi bencana tersebut mengakibatkan hampir 1.000 orang meninggal.

Kondisi tersebut semakin terasa dekat karena bencana juga menimpa wilayah di daerah pemilihannya (dapil) di Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng). "Di Banjarnegara yang wafat 17 yang belum ketemu 11," sebut Utut.

Untuk itu, Utut mendesak Pemerintah mengambil langkah cepat dan luar biasa untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera.

Kerusakan dapat terjadi dalam hitungan sekejap, tapi proses pemulihannya bisa memakan waktu



Utut Adianto

panjang apabila tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat.

"Harus ada langkah yang cepat dan tepat, karena kerusakan dalam tempo sekejap itu potensi lama ngobati," kata dia.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mendesak Pemerintah Pusat (Pempus) mengambil inisiatif lebih besar dalam penanganan bencana yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Pihaknya menerima banyak laporan mengenai ketidakmampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menanggulangi dampak bencana secara mandiri.

"Kemampuan fiskal daerah saat ini sedang tertekan akibat pengurangan Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)," ujar Lasarus dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Karena itu, Lasarus menegaskan Pempus harus turun tangan untuk menutupi celah pendanaan tersebut. Tujuannya, agar bencana yang terjadi di sejumlah daerah bisa segera ditangani.

"Kami berharap pembiayaan bukanlah menjadi kendala utama," tegasnya.

Terkait polemik status bencana nasional di wilayah Sumatera, Lasarus menyerahkannya sepenuhnya keputusan tersebut kepada Pempus. Baginya, yang terpenting adalah kecepatan penanganan di lapangan dan bukan label statusnya.

Selain itu, Lasarus mendesak Pemerintah tidak ragu dan malu mencari bantuan dari pihak mana pun jika sumber daya internal dirasa kurang. Karena prioritas utama negara adalah keselamatan dan kehadiran bagi warga terdampak.

"Masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara," tegasnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memperkirakan biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut dan Sum-

bar mencapai Rp 51,82 triliun.

"Tentu saja, data ini belum akurat, masih terus dilengkapi," ujar Suharyanto dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).

Untuk rincian biaya, Suharyanto menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengestimasi biaya pemulihan khusus untuk Aceh mencapai Rp 25,41 triliun. Biaya perbaikan di Sumut mencapai Rp 12,88 dan Sumbar Rp 13,52 triliun. Anggaran ini direncanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban, mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban, serta mencukupi stok logistik dari tingkat desa hingga daerah.

Untuk daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumbar dan sebagian Sumut, akan masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. "Proses rehabilitasi akan dilakukan bertahap sesuai kondisi daerah," ucap dia.

Dalam fase rehabilitasi, kata Suharyanto, BNPB merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi. Pembangunan huntara akan dilakukan oleh satuan tugas dari TNI dan Polri.

"Kalau hunian tetap akan dibangun oleh Kementerian Perumahan," tutup Suharyanto. ■ TIF